

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN SEBAGAI FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (2006-2022)

Annisa Kartini Herman¹

Abdul Wahab²

Email: annisakherman@gmail.com

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study analyzes the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Regional Financial Independence Ratio on economic growth and poverty in Makassar City (2006-2022). The results show that PAD has a significant and negative effect on economic growth and poverty, indicating that an increase in PAD can support economic growth and reduce poverty through effective allocation of funds. In contrast, the Regional Financial Independence Ratio is insignificant on economic growth, but significant and positive on poverty, reflecting the need for more balanced financial management. In addition, economic growth is not significant in reducing poverty. Indirect analysis shows that PAD has a significant effect on poverty through economic growth, while the Regional Financial Independence Ratio has a negative but insignificant effect on poverty through economic growth.

Keywords: Poverty, Local Revenue, Economic Growth, Regional Financial Independence Ratio

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Makassar (2006-2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui alokasi dana yang efektif. Sebaliknya, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi signifikan dan positif terhadap kemiskinan, yang mencerminkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih seimbang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Analisis tidak langsung menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Penerimaan Asli Daerah Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kemandirian Keuangan

Pendahuluan

Salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling penting di banyak negara utamanya *developing country*, termasuk Indonesia, adalah kemiskinan. Fenomena ini memengaruhi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi, serta kualitas hidup individu. Untuk mengurangi

ARTICLE INFO

Received 26/09/2023

Accepted 10/02/2024

Online 19/02/2024

*Correspondence: Annisa Kartini
Herman

E-mail:

annisakherman@gmail.com

kemiskinan, banyak orang menggunakan berbagai strategi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, bagaimanapun, sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dibaliknya.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang, sekelompok orang, atau individu tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan mendapatkan standar hidup yang layak. Menurut Bank Dunia, ada dua kategori kemiskinan: kemiskinan universal dan kemiskinan menengah. Chambers (1998) berpendapat bahwa kemiskinan dapat digambarkan sebagai konsep yang terdiri dari lima aspek: (1) kemiskinan yang sebenarnya; (2) ketidakmampuan; (3) kerentanan saat menghadapi situasi darurat; dan (5) perasaan terasing secara sosial dan geografis. Sifat kompleks kemiskinan diakibatkan oleh kompleksitas kebutuhan manusia yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan kepemilikan aset, perbedaan struktur sosial-politik, keterbatasan memperoleh pendidikan, dan skill yang rendah ditengarai penyebab kemiskinan memiliki beragam dimensi. Limitasi akses pada berbagai aspek seperti jaringan sosial, sumber pendanaan, dan informasi adalah dimensi sekunder dari kemiskinan (Handayani dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat membantu menurunkan taraf kemiskinan, menurut Iskandar & Subekan (2016). Tingkat belanja masyarakat yang tinggi akan berdampak pada pendapatan negara dan kesejahteraan daerah. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kota Makassar, Pendapatan Asli Daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang dapat digunakan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter capaian pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Laju pertumbuhan ekonomi sebuah daerah menunjukkan kemajuannya, dan ini juga menunjukkan seberapa baik perekonomian daerah memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. PDRB juga digunakan oleh pemangku keputusan untuk menetapkan peraturan perencanaan ekonomi (Stevany Hanalya Dethani, 2017). PDRB digunakan setiap tahun untuk mengumpulkan pemahaman tentang kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun akan meningkatkan kehidupan perekonomian. Untuk meningkatkan keberhasilan ekonomi dan pendapatan masyarakat, produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa harus meningkat. Peningkatan produktivitas masyarakat akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Diketahui bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Kota Makassar akan meningkatkan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Amalia, Noor Cahya, 2018).

Peningkatan kapasitas ekonomi sebuah negara atau daerah untuk memproduksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, disebut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup.

Gambar 1 menunjukkan peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari 2018 hingga 2022. Berdasarkan data saat ini, ada penurunan dari 2018 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 dan 2022, ada peningkatan, meskipun sedikit lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi yang terjadi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan kemiskinan di berbagai wilayah. Di sisi ekonomi, Kota Makassar belum

memenuhi beberapa kebutuhan lokal. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan. Gambar ini juga menunjukkan peningkatan persentase jumlah orang miskin di Kota Makassar. Berdasarkan data, terlihat persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada 2018 dan 2019. Namun, pada tahun 2020–2022, rasio penduduk miskin di Kota Makassar sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi yang terjadi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan kemiskinan di berbagai wilayah. Di sisi ekonomi, Kota Makassar belum memenuhi beberapa kebutuhan lokal. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan.



Gambar 1: Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar 2018-2022

Sumber: (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah 2024)

Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu bersifat linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat membawa manfaat besar, hasilnya tidak selalu merata di seluruh masyarakat. Misalnya, ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tidak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi, yang berarti kemiskinan tetap ada atau bahkan meningkat. Sehingga, sangat penting untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan melalui berbagai saluran. Misalnya, peningkatan ekonomi yang cepat dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, yang berpotensi mengurangi kemiskinan; namun, jika pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan dan pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap kemiskinan mungkin tidak signifikan.

Ravallon & Bidani (2006); Son dan Kakwani (2003); dan Bourguignon (2004) mencatat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan hanya akan berkurang jika ada output ketimpangan yang cukup besar. Dengan kata lain, efek pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tidak signifikan di negara-negara dengan taraf disparitas sedang atau rendah (Iskandar & Subekan, 2016).

Pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Makassar, seperti di banyak tempat lainnya. Namun, sulit untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Kota Makassar dan untuk menemukan elemen-elemen yang dapat meningkatkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 2022, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pajak dan retribusi daerah membentuk Pendapatan Asli Daerah. Untuk membiayai pembangunan wilayah, PAD adalah salah satu sumber yang digunakan sebagai modal oleh pemerintah daerah, sehingga bagi daerah PAD yang besar merupakan modal dalam meningkatkan eksternalitas positif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah tidak dapat hanya bergantung pada dana perimbangan dalam mengejar Pembangunan. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah, daerah harus mandiri dan diharapkan mampu dalam peningkatan kapasitas finansialnya dalam pembiayaan rutin dan pembangunan (Talangamin & Kindangen, 2021).

Hukum Wagner menyatakan bahwa peningkatan ekonomi biasanya diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita. Kehidupan masyarakat dan peran pemerintah akan berkembang bersama-sama, dan biaya untuk ini berasal dari penerimaan pemerintah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dianggap sebagai peningkatan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan pemerintah (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022). Wagner juga menyatakan bahwa jika pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah dapat meningkat secara proporsional. Ini karena pemerintah harus mengatur hubungan antara masyarakat, hukum, pendidikan, dan bidang lain. Bahkan jika tarif pajak tetap, peningkatan ekonomi akan menghasilkan peningkatan pendapatan pajak, yang, menurut teori Peacock dan Wiseman, akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Akibatnya, Produk Domestik Bruto (GNP) selalu meningkat bersamaan dengan pendapatan dan belanja pemerintah. Efek pemindahan, yang merujuk pada argumen Peacock dan Wiseman, menyatakan bahwa orang tidak ingin membayar pajak yang lebih tinggi untuk mensubsidi belanja pemerintah meskipun belanja pemerintah terus meningkat (Maulana, 2024).

Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk mengelola urusan domestiknya adalah dengan melihat keuangan daerah. Anggaran atau keuangan wilayah juga merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan keuangan setiap daerah berbeda karena kebutuhan masing-masing. Setiap daerah memiliki otonomi lokal dan kebebasan ekonomi, tetapi tidak melanggar undang-undang negara (Risyanto, 2015). Pengelolaan alokasi Dana Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat menentukan kemampuan daerah. Sehingga, besaran Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam era otonomi dan desentralisasi (Purnomo & Danuta, 2022). Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dimaksudkan sebagai stimulan yang dapat meminimalkan taraf kemiskinan serta masalah lainnya dalam pembangunan.

Walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah akan berbeda, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menghitung RKKD, Anda dapat membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer dari sumber lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat, dan Pinjaman. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2001). Pola hubungan keuangan akan menunjukkan hasil perhitungan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan nilai antara 0-100 mulai dari pola hubungan instruktif hingga delegatif.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dalam mendanai pembangunan dan operasional pemerintahan menunjukkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Prakoso dkk. (2019). Dengan kata lain, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan layanan kepada masyarakat, terutama mereka yang telah memberikan kontribusi pajak dan retribusi. Rasio ini ditunjukkan dengan membandingkan PAD dengan pendapatan dari sumber lain

seperti pendapatan daerah dan dana perimbangan. Tempat-tempat yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat diantisipasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan (Royda & Riana, 2021). Penelitian yang dilakukan Jalu Ali Prakoso dan Fitrah Sari Islami pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa dalam model pertama, RKKD berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya menggunakan model kedua, ditemukan bahwa rasio ini memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

RKKD dan PAD tidak hanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemiskinan. Ketidakmampuan daerah untuk memenuhi semua aspek hidup, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, disinyalir dapat menyebabkan kemiskinan. Akibatnya, peningkatan tingkat kemiskinan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah dan rasio kemandirian keuangan (Handayani dkk., 2021).

Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) di Kota Makassar dari tahun 2006 hingga 2022 sebagai sumber data sekunder. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian digunakan model analisis linear berganda. Adapun model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

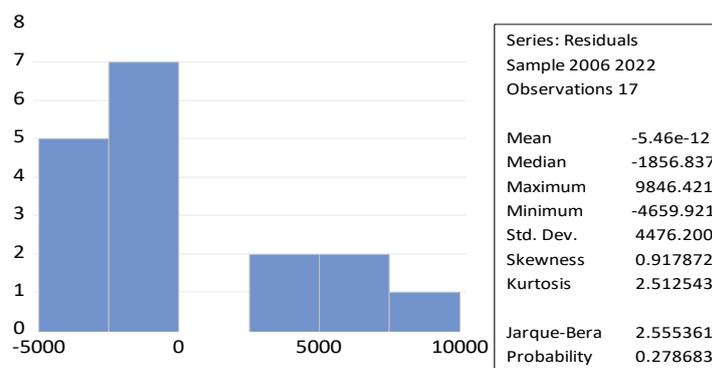
$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + e \dots\dots\dots (2)$$

Di mana: Y_1 merupakan persentase Pertumbuhan Ekonomi; Y_2 adalah Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa); X_1 diartikan sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah; X_2 merupakan Rasio kemandirian keuangan daerah (%); α_0, β_0 adalah Konstanta; $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah Koefisien regresi; dan e adalah *Error term*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Normalitas dapat dilihat jika uji Jarque-Bera memiliki penelitian signifikan atau penilaian atau penilaian probabilitasnya lebih 0.05 atau 5 persen, tentu normal. Sedangkan, apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya kurang 0.05 atau 5%, tentu dikatakan tidak normal. Berdasarkan Gambar 2 hasil pengujian normalitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan probabilitas sebesar 2.555 lebih tinggi dari 0.05 atau $0.278 > 0.05$ sehingga tentu saja bisa dinyatakan data dari penelitian ini terdistribusi secara normal.

**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Eviews 12 diolah (2023)

Pengujian Multikolinieritas ialah uji guna mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dari model regresi atau tidak. Berdasarkan aturan VIF, jika penilaian $VIF < 10$ artinya tidak terjadi multikolinieritas. Sementara, jika nilai $VIF > 10$, artinya terindikasi multikolinieritas. Pada Tabel 1 Dikatakan hitungan uji multikolinieritas pada penelitian ini dengan melihat hasilnya yang menunjukkan nilai centered VIF kurang dari (< 10), sehingga dapat dibuktikan bahwa hasilnya bebas dari multikolinieritas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.21E+08	83.09606	NA
X1	1.15E-18	7.298436	1.502281
X2	100972.4	30.74383	1.098804
Y1	474843.7	21.87479	1.615283

Sumber: Eviews 12 diolah (2023)

Pengujian heteroskedastisitas merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat variasi residu yang tidak sama dalam suatu model regresi pada observasi yang berbeda. Pada Tabel 2 dikatakan hasil uji heteroskedastisitas dari data yang dipakai pada penelitian ini ialah bahwa penilaian signifikansi Prob. Chi-Square adalah $0,519 > 0,05$, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada data yang digunakan untuk penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White		
Null hypothesis: Homoskedasticity		
F-statistic	0.715940 Prob. F(8.8)	0.6867
Obs*R-squared	8.148114 Prob. Chi-Square(8)	0.5193
Scaled explained SS	3.603494 Prob. Chi-Square(8)	0.9355

Sumber: Eviews 12 diolah (2023)

Pengujian autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan mengenal adanya kesalahan dari uji autokorelasi, yaitu adanya keterkaitan antara residual satu observasi bersama observasi lainnya di bentuk regresi. Pengujian autokorelasi ini yang digunakan pada penelitian ini memakai uji Bruesch Godfrey. Karakteristik uji autokorelasi ialah jika tingkat signifikansi >0,05 tentu terbebas dari autokorelasi. Sebaliknya, jika tingkat signifikannya <0,05 niscaya terjadi autokorelasi, Jika ada korelasi, terdedikasikan adanya autokorelasi pada bentuk regresinya. Bentuk regresi ideal tidak menunjukkan autokorelasi pada data yang ada pada penelitian. Pada Tabel 3, dikatakan hitungan uji autokorelasi pada dipergunakan datanya pada penelitian ini ialah penilaian signifikan Prob. Chi-Square sebanyak 0.221 lebih tinggi dari 0,05, sehingga dinyatakan data dari penelitiannya bebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.141166 Prob. F(4.9)	0.3969
Obs*R-squared	5.720693 Prob. Chi-Square(4)	0.2210

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Analisis Regresi Linear Berganda

Model 1

Tabel 4. Hasil Analisis Linear Berganda Model Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.79285	2.538171	5.040185	0.0002
X1	-8.80E-13	3.42E-13	-2.571390	0.0222
X2	-0.123201	0.118763	-1.037372	0.3171

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, maka model persamaan regresi linear berganda adalah:

Model Persamaan 1:

$$Y_1 = 12.792 - 8.799 X_1 - 0.123 X_2 + e.$$

Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien α_0 adalah sebesar 12.792%, yang artinya Pendapatan Asli Daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berubah atau konstan, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sejumlah 12.792%. Selanjutnya, nilai koefisien α_1 adalah sejumlah -8.799%, yang artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi menurun sejumlah -8.799% dengan asumsi variabel PAD dan pertumbuhan bersifat konstan, dan nilai koefisien α_2 adalah sejumlah -0.123%, yang artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi terjadi kenaikan sejumlah -0.123% dengan asumsi variabel RKKD dan pertumbuhan ekonomi bersifat konstan.

Model 2**Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda Model Persamaan 2**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68374.92	10979.02	6.227781	0.0000
X1	-2.60E-09	1.07E-09	-2.427249	0.0305
X2	696.1716	317.7615	2.190861	0.0473
Y1	-716.9378	689.0890	-1.040414	0.3171

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5, maka model persamaan regresi linear berganda adalah:

Model Persamaan 2:

$$Y_2 = 6837 - 2.597 X_1 + 696.171 X_2 - 716.937 Y_1 + e.$$

Hasil ini bermakna bahwa nilai koefisien β_0 adalah sebesar 6837%, yang artinya Pendapatan Asli Daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berubah atau konstan, maka kemiskinan meningkat sejumlah 6837%. Pada nilai koefisien β_1 adalah sejumlah -2.597%, yang artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan terjadi penurunan sejumlah -2.597% dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah dan kemiskinan bersifat konstan. Kemudian nilai koefisien β_2 adalah sejumlah 696.171%, yang artinya apabila rasio kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan terjadi peningkatan sejumlah 696.171% dengan asumsi variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan kemiskinan bersifat konstan. Selanjutnya, nilai koefisien β_3 adalah sejumlah -716.937%, yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan terjadi penurunan sejumlah -716.937% dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan bersifat konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)**Model Persamaan 1**

Koefisien determinasi atau R^2 ialah uji untuk mengenal besarnya pengaruh variabel independen pada menjabarkan variabel dependen. Apabila penilaian R^2 mengarah 1, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat baik dan variabel independen memiliki hubungan kuat dengan variabel dependen. Sementara, jika penilaian R^2 menghampiri 0 dan bukan mendekati 1 dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas terbatas ketika menjelaskan variabel terikat dan variabel Independent mempunyai kaitan lemah kepada variabel dependen.

Berdasarkan pada Tabel 6 diasumsikan hitungan uji R^2 diperoleh secara simultan variabel independen terhadap kemiskinan di Kota Makassar adalah 0,380. Artinya kontribusi dari PAD dan RKKD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar adalah 38.0%. Sisanya perubahan variabel lain yang menjelaskan di luar model adalah 62.0%.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Persamaan 1

R-squared	0.380913	Mean dependent var	7.867059
Adjusted R-squared	0.292472	S.D. dependent var	2.289743
S.E. of regression	1.926009	Akaike info criterion	4.307563
Sum squared resid	51.93317	Schwarz criterion	4.454600
Log likelihood	-33.61428	Hannan-Quinn criter.	4.322178
F-statistic	4.306979	Durbin-Watson stat	1.692110
Prob(F-statistic)	0.034855		

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Uji Parsial/Uji T

Pengujian Parsial dalam variabel independen PAD dan RKKD kepada variabel dependen Pertumbuhan ekonomi. Apabila penilaian probabilitas $<0,05$ berarti variabel tersebut signifikan, maka dari itu ada pengaruh variabel Independent pada variabel dependen dan menerima hipotesisnya. Sedangkan, apabila penilaian probabilitasnya $>0,05$ bisa dikatakan tidak signifikan, maka dari itu tidak ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 16, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Parsial/Uji T Model Persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.79285	2.538171	5.040185	0.0002
X1	8.80E-13	3.42E-13	-2.571390	0.0222
X2	-0.123201	0.118763	-1.037372	0.3171

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Variabel X_1 (Pendapatan asli daerah) memperlihatkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan α , $0.022 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{Tabel}$ ($-2.571 < 1,753$). Disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H_1 diterima H_0 ditolak. Variabel X_2 (Rasio kemandirian keuangan daerah) memperlihatkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan α , $0.3171 > 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{Tabel}$ ($-1.037 > 1,753$). Dengan demikian RKKD berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. H_1 ditolak H_0 diterima.

Uji Simultan/Uji F

Pengujian simultan merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan/Uji F Model Persamaan 1

R-squared	0.380913	Mean dependent var	7.867059
Adjusted R-squared	0.292472	S.D. dependent var	2.289743
S.E. of regression	1.926009	Akaike info criterion	4.307563
Sum squared resid	51.93317	Schwarz criterion	4.454600
Log likelihood	-33.61428	Hannan-Quinn criter.	4.322178
F-statistic	4.306979	Durbin-Watson stat	1.692110
Prob(F-statistic)	0.034855		

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Apabila penilaian signifikansi ($<0,05$), maka dinyatakan menerima hipotesisnya dan variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila penilaian signifikansi ($>0,05$), maka dapat dikatakan hipotesis ditolak dan variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan pada Tabel 17. dinyatakan hitungan uji simultan/uji F, maka didapatkan nilai Prob (F-statistic) ialah $0,034 < 0,05$, dan $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ ($4.306 > 3.357$), berarti secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

Model Persamaan 2

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pada Tabel 9 diasumsikan hitungan uji R^2 diperoleh secara simultan variabel independen terhadap kemiskinan di Kota Makassar adalah 0.462. Artinya kontribusi dari PAD, RKKD dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Makassar adalah 46.2%. Sisanya perubahan variabel lain yang menjelaskan di luar model adalah 53.8%.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Persamaan 2

R-squared	0.462971	Mean dependent var	70063.53
Adjusted R-squared	0.339042	S.D. dependent var	6108.165
S.E. of regression	4965.897	Akaike info criterion	20.06090
Sum squared resid	3.21E+08	Schwarz criterion	20.25695
Log likelihood	-166.5176	Hannan-Quinn criter.	20.08039
F-statistic	3.735759	Durbin-Watson stat	1.112471
Prob(F-statistic)	0.038998		

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Uji Simultan/Uji F

Berdasarkan pada Tabel 10 dinyatakan hitungan uji signifikansi simultan/Uji F, maka didapatkan nilai Prob(F-statistic) ialah $0,03 < 0,05$, dan $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ ($3.735 > 3.357$), berarti secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh kepada kemiskinan.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan/F Model Persamaan 2

R-squared	0.462971	Mean dependent var	70063.53
Adjusted R-squared	0.339042	S.D. dependent var	6108.165
S.E. of regression	4965.897	Akaike info criterion	20.06090
Sum squared resid	3.21E+08	Schwarz criterion	20.25695
Log likelihood	-166.5176	Hannan-Quinn criter.	20.08039
F-statistic	3.735759	Durbin-Watson stat	1.112471
Prob(F-statistic)	0.038998		

Sumber: Eviews 12 diolah (2023)

Uji Parsial/Uji T

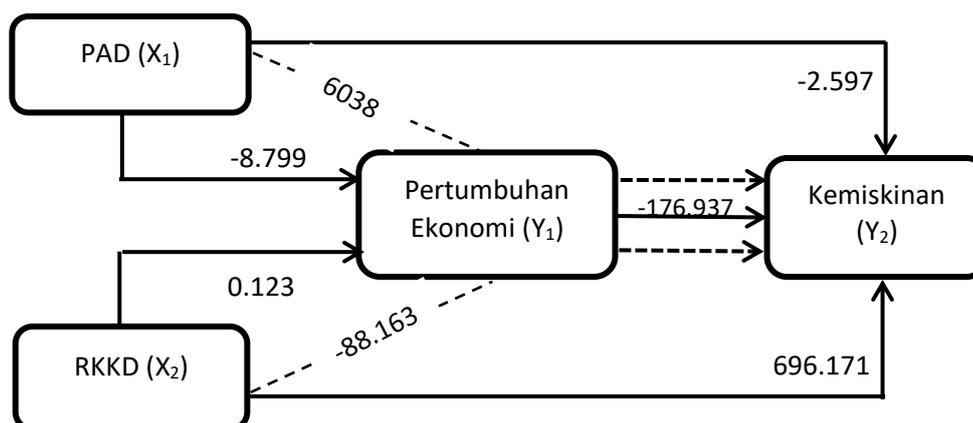
Pengujian Parsial dalam variabel independen (PAD), (RKKD) dan (Pertumbuhan Ekonomi) kepada variabel dependen (Kemiskinan). Apabila penilaian probabilitasnya $<0,05$ berarti variabel tersebut signifikan, maka dari itu ada pengaruh variabel independent pada variabel dependen dan menerima hipotesisnya. Sedangkan, apabila penilaian probabilitasnya $>0,05$ bisa dikatakan tidak signifikan, maka dari itu tidak ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial/Uji T Model Persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68374.92	10979.02	6.227781	0.0000
X1	-2.60E-09	1.07E-09	-2.427249	0.0305
X2	696.1716	317.7615	2.190861	0.0473
Y1	-716.9378	689.0890	-1.040414	0.3171

Sumber: Eviews 12 diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 11 bahwa PAD (X_1), RKKD (X_2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) terhadap Kemiskinan (Y_2) maka; Variabel X_1 (PAD) memperlihatkan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan α , $0.030 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{Tabel}$ ($-2.427 < 1,753$). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. H_1 diterima H_0 ditolak. Untuk variabel X_2 (RKKD) memperlihatkan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan α , $0.047 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{Tabel}$ ($2.190 > 1,753$). Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh dan positif terhadap kemiskinan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. H_1 ditolak H_0 diterima. Selanjutnya, variabel Y_1 (Pertumbuhan Ekonomi) memperlihatkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan α , $0.317 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{Tabel}$ ($-1.040 < 1,753$). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan negatif terhadap kemiskinan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. H_1 ditolak H_0 diterima.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh langsung

-----▶ : Pengaruh tidak langsung

Gambar 3. Pengaruh PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Analisis jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu model dan membantu mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses atau fenomena secara langsung dan tidak langsung pada sebuah bentuk regresi.

Berdasarkan Gambar 3, diperoleh hasil dari uji pada penelitian ini maka hasilnya dapat disimpulkan: terdapat pengaruh langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar -8.799%. Demikian pula terdapat pengaruh langsung variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 0.123%, terdapat pengaruh langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) sebesar -2.597%, terdapat pengaruh langsung variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) sebesar 696.171%, dan juga terdapat pengaruh langsung variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap kemiskinan (Y_2) sebesar -176.937%.

Pengaruh tidak langsung terdapat pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 6308%, dan variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar -88.183%. Total pengaruh hasil pengujian penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X_1 terhadap Y_2 sebesar 6.302%, dan variabel X_2 terhadap Y_2 sebesar -88.136%.

Tabel 12. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh Secara Langsung	Tingkat Signifikan	Pengaruh secara Tidak Langsung Melalui Y_1	Total Semua Pengaruh
$X_1 \rightarrow Y_1$	8.799	0.022	-	8.799
$X_2 \rightarrow Y_1$	0.123	0.317	-	0.123
$X_1 \rightarrow Y_2$	-2.597	0.030	6308	6306
$X_2 \rightarrow Y_2$	696.171	0.047	-88.183	-88.136
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-716.937	0.317	-	-716.937

Sumber: *Eviews 12 diolah (2023)*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Endogenous Growth Theory menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan, inovasi, dan kebijakan ekonomi yang mendukung merupakan elemen penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Lucas, 1988; Romer, 1986). Dalam kaitannya dengan PAD, teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Pendapatan Asli Daerah untuk investasi yang produktif.

Hukum Wagner mengatakan bahwa karena peran pemerintah yang semakin meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat, pengeluaran pemerintah akan terus meningkat. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi akan berkorelasi langsung dengan pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi sumber penerimaan pajak pemerintah.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai probabilitasnya 0.022. melalui hasil dari taraf signifikannya yang lebih kecil dari 0.05. Menyatakan hasil sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini dikarenakan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap peningkatan PAD menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebab terjadinya hal ini dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti adanya peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur oleh pemerintah daerah.

Penerimaan realisasi PAD serta laju pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan serta lain-lain PAD yang sah merupakan kontribusi realisasi PAD yang ikut meningkat. dan Pertanian, Industri pengolahan pengadaan listrik dan gas, Pertambangan, Jasa perusahaan, dsb. merupakan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha yang ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian (BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2023)

Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan, seperti infrastruktur dan industri. Dengan adanya investasi dan pengembangan infrastruktur ini, akan tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas sektor-

sektor ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu, peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur juga akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan daya saing daerah dalam menarik investasi, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan peningkatan aksesibilitas terhadap pasar (Febrianto 2022).

Tren data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar selama 17 tahun diketahui fluktuasi, Terjadi peningkatan penerimaan anggaran daerah serta perekonomian tiap tahunnya. Namun, menurun di beberapa tahun tertentu. Diketahui realisasi PAD sejak tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami perkembangan penerimaan menurun drastis sebesar 20.86% dan laju perekonomian Kota Makassar yang ikut turun dari -8.79% di tahun 2019 menjadi -1.72% pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda berakibat pada menurunnya penerimaan PAD serta kelesuan kegiatan ekonomi Kota Makassar di tahun tersebut.

Pada tiga tahun berikutnya perekonomian Kota Makassar mulai membaik dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.4%. dan Realisasi PAD tercatat sebesar Rp1,380,652,651,450.00 dengan laju perkembangan meningkat 17.47%. Dalam perspektif Amartya Sen, PAD terkait dengan kebijakan fiskal dan penerimaan pemerintah daerah dan penting untuk tidak hanya mengukur kemajuan ekonomi dari segi pertumbuhan pendapatan, tetapi juga melihat distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Selain itu, pembangunan yang berpusat pada manusia dan lebih memperhatikan aspek-aspek seperti kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan,

Teori Harrod-Domar yang dikemukakan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar menyatakan bahwa peningkatan investasi dalam ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Sejalan dengan teori ini, Solow-Swan menyatakan adanya hubungan antara akumulasi modal dengan pertumbuhan ekonomi dan PAD berperan sebagai faktor produksi penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Damanik 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Damanik (2022); Febrianto (2022); dan Manek & Badrudin (2017) menyatakan bahwa PAD secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Hasil signifikansi nilai PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan otonomi sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan PDRB dapat merefleksikan kondisi perekonomian makro suatu daerah. Selain itu, pendapatan pemerintah daerah yang bersumber pajak dari masyarakat, besarnya pungutan pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian makro suatu wilayah yang baik dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang semakin meningkat. Namun pajak yang tinggi dapat membebani para wajib pajak sehingga diharapkan jumlahnya tidak terlalu tinggi.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai probabilitinya 0.0317.

Melalui hasil dari taraf signifikansinya yang lebih besar dari 0.05, menyatakan bahwa antara RKKD dengan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh. Sehingga pada penelitian ini tidak sesuai hipotesis yang diharapkan peneliti. Tingginya tingkat rasio dapat mengurangi bantuan terhadap pemerintah pusat begitu pun sebaliknya. Artinya, kemandirian daerah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal, disebabkan karena pemerintah daerah memiliki kemandirian yang tinggi tetapi juga memiliki defisit anggaran yang besar sehingga efektivitasnya terhadap perekonomian berkurang sehingga tidak terkontrol.

Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat mungkin memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan sumber daya untuk program pembangunan ekonomi lokal. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kemandirian keuangan daerah yang tinggi tidak selalu berarti bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya ke program-program pembangunan ekonomi. Kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif dan alokasi anggaran yang tepat juga perlu diperhatikan. Adapun juga faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, kebijakan investasi, akses terhadap pasar, dan pendidikan (Risyanto 2015).

Studi ini selaras dengan Risyanto (2015); Saputra dkk., (2015); Widyanti (2020) mengatakan tidak signifikan dan positif. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Namun, Kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam perekonomian yang sangat tergantung pada sektor tertentu, terutama jika sumber pendapatan utama daerah tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat. Akan tetapi, faktor-faktor lain seperti stabilitas politik, infrastruktur yang memadai, atau kebijakan moneter serta fiskal nasional yang lebih berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daripada kemandirian keuangan daerah sendiri (Risyanto 2015).

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitinya 0.030. Melalui hasil taraf signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05, menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan hipotesis. Artinya, Pendapatan asli daerah merupakan salah satu input sebagai penanggulangan kemiskinan, kapasitas PAD yang baik menunjukkan dampak kemandirian dalam pengoptimalan pada pengembangan serta perkembangan di suatu daerah. Pengadaan fasilitas, infrastruktur serta sarana prasarana seperti memberikan kuota beasiswa pendidikan kepada keluarga yang tidak mampu secara finansial serta penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah yang sulit terjangkau transportasi.

Merujuk pada tren fluktuasi data realisasi PAD dan Kemiskinan di Kota Makassar selama 17 tahun terakhir terjadi peningkatan secara terus menerus tiap tahunnya. Akan tetapi, Kota Makassar masih berada pada tingkat kemampuan "Sedang" dengan rata-rata PAD sebesar 33.03%. Artinya kategori Sedang PAD Kota Makassar masih mampu berperan dalam

pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pelayanan masyarakat. (Panggabean dkk., 2022) dengan pemenuhan kepentingan publik dapat menanggulangi kemiskinan guna kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, semakin tinggi penerimaan PAD akan menurunkan persentase kemiskinan di Kota Makassar.

Ekonomi regional menyatakan pendapatan daerah yang tinggi akan mengakibatkan perolehan pendapatan asli yang berasal dari sumber daya alam atau sumber ekonomi lokal, dengan demikian dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut Sumber. Berdasarkan penelitian Manek & Badrudin (2017); Panggabean dkk., (2022); Putrayuda dkk., (2017) memperoleh hasil di mana PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, Karena Peningkatan PAD berperan dalam pengentasan kemiskinan yang melalui pemenuhan kepentingan publik seperti meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk menyejahterakan masyarakat di suatu daerah.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitasnya 0.047. Melalui hasil taraf signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05, menyatakan RKKD memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini RKKD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sehingga dapat dikatakan hasil sesuai dengan hipotesis. Peningkatan tingkat kemandirian keuangan Kota Makassar di tiap tahunnya terjadi fluktuasi, di mana perkembangan kemandirian dari instruktif ke Konsultatif menunjukkan hasil pendapatan tidak tergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat, sehingga mampu mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah serta mengurangi kemiskinan.

Tingkat kemandirian keuangan Kota Makassar yang tinggi memberikan fleksibilitas dan kemampuan pada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara efisien dan fokus pada program terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan memiliki dana yang lebih mandiri pemerintah Kota Makassar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para investor. Hal ini memperoleh dukungan finansial dan membantu pemerintah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan program pemberantasan kemiskinan (Jalu Ali Prakoso, Fitrah Sari Islami 2019)

Handayani dkk., (2021); dan Jalu Ali Prakoso, Fitrah Sari Islami, (2019) menyatakan kemandirian daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kemiskinan, kemandirian keuangan daerah mempengaruhi efektivitas pembangunan wilayah dalam mengurangi kemiskinan. Dengan memiliki sumber daya keuangan yang cukup, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan nilai probabilitasnya 0.317. melalui hasil dari taraf signifikannya yang lebih besar dari 0.05, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga pada penelitian ini tidak sesuai hipotesis yang diharapkan peneliti.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu merata di seluruh sektor dan masyarakat. Sering kali, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya menyentuh sektor-sektor tertentu atau kelompok masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sektor industri atau perdagangan mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan bagi kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan

Distribusi pendapatan dan akses terhadap kesempatan ekonomi yang tidak merata juga dapat menjadi faktor penentu kemiskinan. Pada Gambar 5 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin yang meningkat tiap tahunnya menunjukkan kalau kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Makassar, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi rancangan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Teori Robert Solow mengemukakan pendapatan nasional yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui peningkatan akumulasi modal dan peningkatan efisiensi teknologi. Pendapatan nasional dapat mendorong tinggi PDB, sehingga berpeluang membuka ekonomi baru, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Selaras dengan Teori Trickle-down yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan secara otomatis, apabila perekonomian tumbuh maka pendapatan dan keuntungan yang mengalir dari sektor kaya ke sektor miskin untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat (Andriansyah 2015; dan Binti 2016).

Studi yang dilakukan oleh Astuti, (2017); Putrayuda dkk., (2017); dan Handayani dkk., (2021) mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang salah satu akibatnya adalah perekonomian tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak merata dinikmati masyarakat yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan dan berimbas pada meningkatnya kemiskinan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh langsung dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan adalah 0.030 sedangkan pengaruhnya secara tak langsung dari Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi ialah 6308. Dengan demikian, pengaruh keseluruhan dari PAD terhadap kemiskinan yaitu jumlah dari nilai pengaruhnya secara langsung dan nilai pengaruhnya secara tak langsung. Hasil tersebut diketahui total pengaruhnya yaitu 6306 dan penilaian secara tak langsung yakni 6308, menjelaskan bahwa pengaruhnya PAD terhadap kemiskinan lebih kecil dibandingkan pengaruhnya PAD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Nilai Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memberikan signifikansi langsung terhadap kemiskinan, Namun, melalui pertumbuhan ekonomi PAD yang tinggi tidak berarti pada pemerintah daerah akan mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan tepat sasaran sehingga dapat menghambat distribusi PAD yang efektif mengurangi kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin di suatu wilayah serta sektor tertentu seperti industri atau sumber daya alam yang dimiliki segelintir individu, maka manfaat pendapatan tidak akan merata dan tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (I. Saputra, Supeno, and Wardi 2023)

Amartya Sen berpendapat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pertumbuhan ekonomi dapat membawa dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Sehingga pendapatan yang meningkat dapat menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memberikan dorongan pada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi mengurangi ketidaksetaraan. Hal ini selaras dengan penelitian (Manek & Badrudin, 2017; I. Saputra dkk., 2023; dan Yasa, 2021) menyatakan PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh langsung pada nilai koefisien dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap kemiskinan adalah 696.171 sedangkan pengaruhnya secara tak langsung dari RKKD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi nilai ialah -88.183. Dengan demikian, pengaruh keseluruhan dari rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan yaitu jumlah dari nilai pengaruhnya secara langsung dan nilai pengaruhnya secara tak langsung. Hasil tersebut diketahui total semua pengaruhnya yaitu -88.136 dan penilaian pengaruhnya secara tak langsung yakni -88.183, menjelaskan bahwa pengaruhnya RKKD terhadap kemiskinan lebih besar dibandingkan pengaruhnya RKKD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Nilai total pengaruh Rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil tidak signifikan dan negatif ($-88.183 < 0.05$). Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dalam daya dukung keuangan daerah untuk membiayai program pengentasan kemiskinan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah atau kebijakan fiskal yang tidak optimal dan kebijakan sosial yang kurang efektif atau kurangnya program pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini diperlukan pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dan lebih efisiensi penggunaan anggaran. disertai meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung program pembangunan ekonomi yang holistik dan berlanjut. Sejalan dengan penelitian (Handayani dkk., 2021; Woestho dkk., 2020, dan Fitrah Sari Islami, (2019) menyatakan hasil rasio kemandirian keuangan daerah tidak berkorelasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Karena, tingginya PAD membuktikan kemampuan Kota Makassar cukup baik dalam pelaksanaan otonomi sehingga memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan dana ke beberapa sektor-sektor ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Karena Rasio kemandirian Kota Makassar yang terlalu tinggi mengakibatkan ketidakseimbangan fiskal yang kurang efektif dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal.

Ditemukan pula bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Nilai tinggi PAD menunjukkan kemampuan Kota Makassar dalam mengurangi kemiskinan, Hal ini disebabkan adanya otonomi pemerintah dalam sumber pendanaan yaitu dorongan investasi, membantu sektor usaha kecil dan menengah, dan dapat menciptakan peluang kerja baru. Namun, variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi secara langsung berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan. Karena, Sumber daya keuangan yang cukup pemerintah Kota Makassar dapat mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta pengadaan akses layanan publik yang berkualitas bagi masyarakatnya. Demikian pula pada variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. Karena, penduduk miskin di Kota Makassar tidak sedikit yang masih memerlukan intervensi dari pemerintah untuk pemenuhan akses program-program sosial seperti bantuan tunai, pendidikan gratis, layanan kesehatan publik, subsidi makanan, dsb.

Secara tidak langsung PAD berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Karena, Pelaksanaan otonomi yang berhasil dilaksanakan oleh Kota Makassar sehingga berkorelasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, secara tidak langsung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Karena, Tingginya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan besar kemampuan daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Referensi

- Amalia, Noor Cahya, Agus Endro Suwarno. 2018. "Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." : 1–23.
- Amalia. 2021. "Teori Ekonomi David Ricardo, Robert Malthus, Dan Jean Baptiste Say."

- Andriansyah, Romi. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2009-2013." <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/14809>.
- Astuti, Wuku. 2017. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011)." *Jurnal EBBANK* 6(1): 1–18.
- Binti, Margo Tando. 2016. "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah." *Jurnal Komunikasi, Bisnis, Manajemen*: 69–78.
- BPK. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." : 1–73.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. *Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Kota Makassar. <https://sulsel.bps.go.id/>.
- Damanik, Marita. 2022. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang." 4(2).
- Diolah Peneliti. 2023. "Diolah Peneliti."
- Dzul. 2016. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan."
- Febrianto, Dimas. 2022. "Pengaruh PAD , DAU , Dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Barat." 1(8): 2411–25.
- Halim, Abdul. 2001. "Manajemen Keuangan Daerah."
- Handayani, Milda, Rycha Kuwara Sari, and Ari Sulistyowati. 2021. "Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bogor." *Aliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 16(1): 23–30.
- Indasari, Viki. 2011. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH."
- Iskandar, Azwar, and Achmat Subekan. 2016. "Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan (Determinant Analysis of Poverty in South Sulawesi)." *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*: 1–26.
- Jalu Ali Prakoso, Fitrah Sari Islami, Rr Retni Sugiharti. 2019. "Analisis Kemampuan Dan Kemandiriann Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Riset Ekonomi Pembangunan* 4(1): 161–73.
- Kristin Ari P. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(2): 233–34.
- Manek, Marianus, and Rudi Badrudin. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Telaah Bisnis* 17(2): 81–98.
- Marliana, R. 2018. "Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia."
- Noni Kumpangpune¹, David P. E. Saerang², Daisy.S.M. Engka³. 2019. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung." 20(3): 60–77.

- Panggabean, Helena Louise, Danarti Hariani, and A B Yanuar. 2022. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019." 6(April): 2200–2208.
- Purnomo, Sodik Dwi, and Krisnhoe Sukma Danuta. 2022. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan : Studi Empiris Di Sumatera Utara." 6(1): 215–20.
- Putrayuda, T. Fahrurriza, Yulia Efni, and Kamaliah. 2017. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015." IX(3): 198–224.
- Ravallion, Martin, and Benu Bidani. 1994. "How Robust Is a Poverty Profile?" World Bank Economic Review 8(1): 75–102.
- Risyanto, Hilmi. 2015. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013." Jurnal Coopetition VI(Maret): 21–33.
- Rori, Chindy Febry et al. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16(2): 243–54.
- Royda, and Dwi Riana. 2021. "Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan." Akuntansi dan Manajemen 14(2): 50–64.
- Saputra, Budi, Yohanes Vyn. Amzar, and Purwaka H.P. 2015. "Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi." Ekonomi Regional 10(2): 145–51.
- Saputra, Irwan, Bambang Supeno, and Jeni Wardi. 2023. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau." 2(2): 234–50.
- Stevany Hanalya Dethani. 2017. "Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat." Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah terhadapStevany Hanalya Dethan 11(1): 138.
- Taryono. 2012. "Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan." Pustaka. Ut.: 1.2-1.51. <http://repository.ut.ac.id/4234/1/MMPI5204-M1.pdf>.
- Wau, M., Leni, W., & Fau, J. F. 2022. "Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)." : 1–73.
- Widyanti, Rahmi. 2020. "Hubungan Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar." : 1–15.
- Woestho, Choiroel, Ari Sulistyowati, dan Rycha Kuwara Sari. 2020. "Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto." Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo 6(2): 182–91.
- Yasa, I Nyoman Mahaendra. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali." E-Jurnal EP Unud: 2750–78. <https://repofeb.undip.ac.id/9908/>.

